

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara di Amerika latin sering terlibat konflik, baik konflik internal atau pun konflik yang terjadi antar negara di kawasan tersebut. Apabila ditilik lebih jauh maka kita dapat melihat bahwa penyelesaian konflik yang terjadi di Amerika Latin melalui kekerasan, dan tidak jarang menghasilkan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Berbagai kasus di Amerika Latin pada umumnya meliputi pelanggaran terhadap HAM, *drug trafficking*, *human trafficking*, dan pelanggaran lainnya. Konflik yang terjadi di kawasan Amerika Latin pada umumnya telah berlangsung selama waktu yang tidak singkat, termasuk konflik yang terjadi di Kolombia, yang disebabkan oleh kelompok separatis yang disebut *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo* (FARC-EP).

Kemunculan FARC-EP tidak bisa dilepaskan dari perang saudara dan intensitas kekerasan yang tinggi di Kolombia. Kasus perlawanan FARC-EP bermula dari konflik yang terjadi sekitar tahun 1940-an hingga 1950-an, atau biasa disebut *La Violencia*, yang melibatkan dua partai politik besar (Partai Liberal dan Partai Konservatif).¹ *La Violencia* kemudian menyisakan perseteruan antara pemerintah dan kelompok paramiliter yang disebabkan oleh pembagian kekuasaan lahan yang tidak merata antara kota dan desa. Proses eskalasi berkembang dengan munculnya kelompok-kelompok anti pemerintah yang membuat otoritas pemerintah semakin melemah, termasuk kelompok bersenjata sosialis-komunis FARC-EP. Kelompok gerilya yang berasal dari petani dan buruh ini didirikan pada tahun 1964. FARC-EP merupakan kelompok yang beraliran Marxist. Untuk menekan pihak pemerintah secara politik serta mendapatkan tuntutan

¹ *La Violencia* merujuk pada perseteruan antara Partai Konservatif dan Partai Liberal Kolombia yang dipicu oleh pembunuhan kandidat presiden Liberal Jorge Eliecer Gaitan pada 9 April 1948. Konflik ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru negeri dan menewaskan lebih dari 200.000 warga akibat perebutan wilayah kekuasaan dan sengketa lahan.

mereka, FARC-EP melakukan berbagai tindakan diantaranya pemerasan, penculikan, pemerasan, pembajakan, *drug trafficking*, dan perdagangan senjata. Hal ini juga dilakukan untuk mendapatkan dana dalam upaya menjalankan misi mereka. Sehingga, dapat dikatakan bahwa target FARC-EP terhadap Pemerintah Kolombia meliputi bidang politik, militer, dan ekonomi. Di bidang *drug trafficking*, FARC-EP tidak hanya merambah dari segi penjualan tetapi juga dari segi produksi dan distribusi. Untuk memperkuat pengaruhnya lebih luas lagi FARC-EP tidak hanya menculik masyarakat Kolombia tetapi FARC-EP juga tercatat pernah menculik tiga orang kontraktor asal Amerika (Neuman, 2015).

Upaya perdamaian telah berulang kali dilakukan oleh beberapa presiden pada masa pemerintahannya. Pada tahun 1966, pemerintahan Guillermo Leon Valencia pernah menjalankan Operasi Marquetallia untuk menghilangkan kantong-kantong marxisme, terutama di wilayah Kolombia selatan (Bargent, 2014). Setelah berusaha menghancurkan wilayah FARC-EP, pemerintah melaksanakan reformasi agraria untuk mensejahterakan rakyat. Namun demikian, kelompok FARC-EP justru pindah ke daerah rural dan mengokupasi wilayah yang dihuni oleh kaum migran. Kaum migran kemudian dipaksa oleh FARC-EP untuk menanam daun koka demi memenuhi kebutuhan mereka.

Upaya lain untuk meredam aksi FARC-EP dilakukan saat Kolombia dipimpin oleh Presiden Andres Pastrana (1998-2002). Pastrana menginisiasi *Colombia Plan* pada tahun 1999 untuk menghadapi konfrontasi situasi politik domestik melalui pembatasan penyelundupan narkoba dan memerangi pemberontakan FARC-EP. Langkah yang diambil oleh Pastrana ialah melumpuhkan pendapatan utama dari FARC-EP, yakni melalui adopsi kebijakan *War on Drugs* melalui kerjasama dengan Amerika Serikat (AS) dalam menekan perdagangan narkoba ilegal dan peningkatan armada militer domestik (Miranda, 2013).

Pengganti Pastrana, Presiden Alvaro Uribe, membuat kebijakan *Policy for the Consolidation of Democratic Security* (PCDS) di tahun 2007 yang berusaha untuk membangun kembali kontrol negara atas wilayah yang

terimbas kegiatan kelompok-kelompok bersenjata ilegal dan perdagangan narkoba (Beittel, Peace Talk in Colombia, 2015). Kebijakan ini memiliki lima tujuan strategis yang dimanifestasikan menjadi 28 rencana. Inti tujuan kebijakan ini adalah untuk menciptakan kualitas pertahanan guna meningkatkan keamanan dan kepercayaan yang berimplikasi pada peningkatan perekonomian domestik. Upaya Uribe setidaknya dapat menekan keagresifan FARC-EP dalam mengokupasi hak warga sipil, misalnya pada pemaksaan para imigran untuk menanam koka demi memenuhi kebutuhan FARC-EP. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kolombia ini belum bisa mengakhiri konflik karena FARC-EP tetap melakukan perlawanan hingga dekade 2010-an.

Pada akhirnya ketika Presiden Juan Manuel Santos berkuasa pada 2010, pemerintah Kolombia mulai mencoba membuka kembali jalur komunikasi dengan pihak FARC-EP guna menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama. Santos mengadakan pembicaraan tertutup antara pemerintah Kolombia dengan FARC-EP dan 3 negara yang dianggap mampu bersikap netral serta mampu menjadi mediator diantara kedua belah pihak yaitu Venezuela, Norwegia dan Kuba (Beittel, Peace Talk in Colombia, 2015). Peranan pihak ketiga diharapkan dapat membantu kedua belah pihak untuk membangun kembali komunikasi dan menanamkan rasa percaya kepada pihak lain. Komunikasi dan rasa percaya dapat dijadikan sebagai modal awal bagi kedua belah pihak untuk mencapai kata damai. Venezuela dipilih karena posisinya sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Kolombia. Kuba sendiri dipilih sebagai penjamin serta perwakilan oleh FARC-EP, selain juga karena memiliki latar belakang ideologi yang sama. Sedangkan, dipilihnya Norwegia menjadi menarik karena negara yang berjarak lebih dari 9.000 km dari Kolombia ini tidak memiliki dampak langsung terhadap konflik yang terjadi di Kolombia ini. Norwegia dipilih karena dianggap sudah berpengalaman dan bisa menjadi mediator dalam membantu penyelesaian konflik ini.

Norwegia sendiri sejak tahun 1990-an telah banyak berperan sebagai fasilitator dalam sejumlah proses perdamaian dan rekonsiliasi. Beberapa

upaya yang telah dilakukan Norwegia dalam upaya perdamaian yaitu pada tahun 1993 antara Palestina-Israel. Selain itu pada tahun 1996 di Guatemala yang menghasilkan kesepakatan damai. Norwegia juga berperan dalam perdamaian di Srilanka pada pertengahan 2000an (Wicaksono, 2019) dan juga di belahan dunia lainnya seperti di Filipina, Afghanistan, dan lain-lain (Affairs, 2016). Norwegia sendiri telah memulai proses perdamaian di Kolombia ketika terlibat dalam proses negosiasi Caguan (1998-2002) yang berakhir dengan kegagalan kesepakatan antara pemerintah Kolombia dan FARC-EP. Pasca interaksi pertama Norwegia dengan Kolombia ini, Norwegia banyak berperan dan membantu dialog-dialog perdamaian baik itu dari masyarakat Kolombia maupun pemberontak Kolombia dan disampaikan kepada pemerintah kolombia (Fabra-Mata & Wilhelmsen, 2018). Norwegia sebagai negara kecil dalam dunia Hubungan Internasional memiliki tradisi yang baik dalam hal mendukung upaya perdamaian yang komprehensif di berbagai belahan dunia. Keterlibatan Norwegia dalam proses perdamaian di Kolombia tentu akan mendorong status Norwegia dan menaikkan citra Norwegia di mata dunia (Strom, 2019).

Pengalaman Norwegia dalam menangani berbagai konflik di berbagai belahan dunia ini dijadikan Santos sebagai referensi untuk membantu proses perdamaian antara pemerintah Kolombia dengan FARC-EP. Pada akhirnya kedua belah pihak berhasil menandatangani perjanjian damai di Havana pada tahun 2016 dan menghasilkan kesepakatan pembubaran FARC-EP yang menandai berakhirnya konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 50 tahun ini. Dengan melihat peran Norwegia yang merupakan negara dari Eropa dalam mengatasi konflik internal di Kolombia yang notabeneanya terletak kawasan Amerika Selatan ini membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan penelitian ini akan difokuskan membahas tentang upaya Norwegia dalam penyelesaian konflik di Kolombia dengan kurun waktu 2010-2016.

1.2 Rumusan Masalah

Kukuh Iqbal, 2022

UPAYA NORWEGIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PEMERINTAH KOLOMBIA DENGAN FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA - EJÉRCITO DEL PUEBLO (FARC-EP) 2010-2016

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id-www.ibrary.upnvj.ac.id-repository.upnvj.ac.id]

Konflik berkepanjangan yang terjadi di Kolombia secara langsung mengganggu stabilitas nasional di negara tersebut. Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pemerintahan untuk menyudahi konflik berkepanjangan ini. Pada akhirnya pada masa pemerintahan Presiden Santos, pemerintah Kolombia mulai bernegosiasi dengan FARC-EP dengan mengundang beberapa pihak sebagai mediator, salah satunya Norwegia. Upaya ini pada akhirnya berhasil dengan ditandatanganinya perjanjian damai antara kedua belah pihak di Havana dan menghasilkan pembubaran FARC-EP yang menandai berakhirnya pemberontakan yang telah berlangsung sejak lebih dari lima dekade yang lalu.

Untuk itu penulis akan pertanyaan penelitian sebagai rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu **Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Norwegia dalam penyelesaian konflik antara pemerintah Kolombia dengan FARC-EP pada periode 2010-2016?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Norwegia dalam penyelesaian konflik antara pemerintah Kolombia dengan FARC-EP pada periode 2010-2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan daripada penulisan skripsi, perlu pula diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi akademisi ilmu hubungan internasional, yaitu Dosen dan Mahasiswa dalam mengkaji dan memahami bagaimana upaya penyelesaian konflik antara pemerintah Kolombia

dengan FARC-EP serta bagaimana peran dan pengaruh Norwegia dalam upaya penyelesaian tersebut.

2. Menjadi bahan pertimbangan bagi setiap aktor hubungan internasional, baik itu individu, organisasi, pemerintah, maupun organisasi non-pemerintah baik dalam level nasional, regional, maupun internasional tentang bagaimana penyelesaian konflik internal dalam suatu negara melalui peran aktor-aktor eksternal seperti Norwegia yang mampu memberikan pengaruh besar dalam proses penyelesaian konflik tersebut.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika yang terdapat dalam penulisan ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, yang dimana mencakup tentang sejarah konflik Kolombia dengan FARC-EP serta upaya yang pernah dilakukan sebelumnya, lalu rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai teori dan konsep yang digunakan untuk menjelaskan penelitian ini, lalu *literature review* yang digunakan untuk mendukung penelitian serta alur pemikiran untuk menjelaskan kerangka penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai metode yang digunakan dalam meneliti skripsi ini serta teknik pengumpulan data yang dilakukan guna mendukung penelitian ini.

BAB IV: KONFLIK ANTARA PEMERINTAH KOLOMBIA DENGAN FARC-EP

Bab ini berisi sejarah awal terciptanya konflik antara pemerintah Kolombia dengan FARC-EP, selanjutnya membahas tentang transformasi FARC-EP dari awal terbentuk hingga sekarang, membahas upaya perdamaian pemerintahan Kolombia terdahulu dengan FARC-EP serta proses negosiasi antara pemerintah Kolombia dengan FARC-EP.

BAB V: UPAYA NORWEGIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ANTARA PEMERINTAH KOLOMBIA DENGAN FARC-EP

Bab ini berisi tentang upaya Norwegia dalam penyelesaian konflik di Kolombia.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran dari penelitian ini.